



Dewan Pengarah Lemhannas RI Tetapkan Kebijakan Umum

Dewan Pengarah Lemhannas RI telah menetapkan Kebijakan Umum Dewan Pengarah Periode 2012 – 2016 melalui sidang pleno yang berlangsung di Gedung Astagatra Lemhannas RI, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Menurut Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA, selaku Koordinator Dewan Pengarah Lemhannas RI, kebijakan umum tersebut merupakan acuan dan arah pelaksanaan tugas dan fungsi Lemhannas.

"Kebijakan umum tersebut merupakan acuan dan arah untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Lemhannas sesuai amanat peraturan perundang-undangan" kata Gubernur Prof. Budi Susilo Soepandji, Senin, (28/5).

Pada dasarnya, begitu lanjut Prof. Budi Susilo Soepandji, kebijakan umum, sekaligus merespons tantangan perkembangan dinamika lingkungan strategis nasional, regional dan global.

bersambung ke hal. 2 ...



Redaksi :

Pengarah :

Drs. Chandra Manan Mangan, M.Sc.

Penanggung Jawab :

Brigjen TNI Sahat Aritonang.

Redaktur :

Megawarni Simamora, S.E, M.M.

Penyunting/Editor :

Kolonel Laut (P) Estu Prabowo,

Letkol Caj G.T. Situmorang.

Redaktur Pelaksana :

Bambang Iman Aryanto, S.T., Endah

Heliana, S.Sos., Trias Noverdi, S.S.

Desain Grafis & Fotografer :

Arianto S.H., Sertu Syafrizal.

Sekretariat :

Linda Purnamasari S.Sos., Gatot, Indah Winarni.

Distribusi :

Letkol Inf. Sumurung, Peltu (K) Fransisca,

Lettu Cba Supriyono, Suryadi.

Alamat Redaksi :

Biro Humas Settama Lemhannas RI,

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10

Jakarta Pusat, 10110, Telp. (021)

3832108, 3832109, Fax. (021) 3451926,

Website <http://www.lemhannas.go.id>

Daftar Isi:

- 1 Dewan Pengarah Lemhannas RI Tetapkan Kebijakan Umum**
- 3 Lemhannas RI dan ANRI Tanda Tangan MoU**
- 4 Lemhannas RI Luncurkan Majalah Swantara**
- 4 Lemhannas RI Permudah Akses Publik Terhadap Karyanya**
- 5 Orasi Pengentasan Kemiskinan Warnai HUT Lemhannas RI**
- 6 Penegakan Hukum di Laut Belum Maksimal**
- 7 Terjadi Pembiaran Terhadap Pancasila**
- 8 Ekonomi Kreatif Dorong Pemanfaatan Cadangan Sumber Daya**
- 9 Pembangunan Ekonomi Wilayah Perbatasan Perlu Penetapan Prioritas**
- 10 Gubernur Lemhannas RI: Paradigma Baru Korpri, Peningkatan Kompetensi**
- 11 Lemhannas RI dan CDSS Australia Bahas Isu Keamanan Maritim**
- 12 Lemhannas RI dan Harian Sinar Harapan Jalin Kerjasama**

....sambungan dari hal. 1

Dikatakannya, penetapan kebijakan umum itu menyangkut kesiapan Lemhannas RI menuju lembaga berkelas dunia (*world class institution*).

"Makna paling mendasar dengan ditetapkannya kebijakan umum adalah kita harus siap melaksanakannya, agar Lemhannas menuju *world class institution* dapat kita raih" katanya menjelaskan.

Di hadapan peserta sidang pleno, Prof. Budi Susilo Soepandji menegaskan Dewan Pengarah akan memonitor dan mengevaluasi implementasi kebijakan umum yang telah ditetapkan.

Hasil *monitoring*, evaluasi dan perkembangan aktual, demikian imbuhan Ketua Dewan Pengarah, penting sebagai masukan dalam rangka merumuskan kebijakan umum berikutnya.

Kebijakan umum yang dituangkan dalam bentuk

buku antara lain menegaskan peruntukannya dalam menyusun perencanaan, penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap program dan kegiatan Lemhannas RI.

Materi kebijakan umum mencakup kebijakan bidang pendidikan pimpinan tingkat nasional, bidang pengkajian strategis dan bidang pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Materi lainnya meliputi bidang kesekretariatan, inspektorat, penguatan organisasi dan penganggaran.

Hadir dalam sidang pleno itu anggota Dewan Pengarah Prof. Dr. Juwono Sudarsono, MA dan Jenderal Polisi (Purn) Drs. Bambang Hendarso Danuri, MM.

Sidang pleno juga dihadiri Wakil Gubernur Letjen TNI Moeldoko, S.IP, Sekretaris Utama Drs. Chandra Manan Mangan, M.Sc, Para Deputi, Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji dan Tenaga Profesional.



Lemhannas RI dan ANRI Tanda Tangan MoU

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) dan Arsip nasional Republik Indonesia (ANRI) menandatangani nota kesepahaman (*memorandum of understanding/MoU*) di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Senin (21/5).

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA dan Kepala ANRI M. Asichin, disaksikan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Prof. Dr. Eko Prasjojo.

Nota Kesepahaman antara Lemhannas RI dan ANRI mencakup bidang Ketahanan Nasional dan Penyelenggaraan Kearsipan.

Bidang itu meliputi pendidikan kepemimpinan tingkat nasional, pengkajian strategis, pemantapan nilai-nilai kebangsaan, kebijakan kearsipan nasional, pembinaan kearsipan nasional dan pengelolaan arsip.

Melalui penandatanganan tersebut, Lemhannas RI dan ANRI dapat saling bersinergi dalam melaksanakan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Selain penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Lemhannas RI, ANRI juga menandatangani *executive program* dengan Perum LKBN Antara dan P.T. Telkom, serta dengan lembaga administrasi negara China (*The State Archives Administration of China*).



Foto : Humas Lemhannas



LEMHANNAS RI

newsletter

edisi 35, 20 Juni 2012



Foto : Humas Lemhannas

Lemhannas RI Luncurkan Majalah Swantara

Bertepatan dengan upacara peringatan hari ulang tahunnya yang ke-47, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) meluncurkan majalah baru bernama Swantara. Peluncuran dilakukan di auditorium Lemhannas, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (23/5).

Peluncuran majalah tiga bulanan itu dilakukan Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA di hadapan seluruh peserta upacara dan undangan.

Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA mengatakan, majalah yang dikelola Biro Humas ini merupakan media komunikasi internal dan eksternal antara Lemhannas RI dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

Disebutkan, dengan nama yang diartikan sebagai "nusantara yang mandiri" itu, Swantara dapat mewakili pandangan dan sikap lembaga mengenai wawasan kebangsaan.

Peluncuran ditandai dengan penyerahan majalah kepada Jaksa Agung RI Jaksa Agung RI Basrief Arief, SH, MH dan Ketua Ikatan Alumni yang juga mantan Gubernur Lemhannas RI Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, M.Sc.

Majalah juga diberikan kepada perwakilan LKBN Antara Bambang Purwanto dan perwakilan LPP RRI Jakarta Dadi Sumihardi.

Lemhannas RI Permudah Akses Publik Terhadap Karyanya

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) akan mempermudah akses publik terhadap karya-karya lembaga tersebut, melalui penerbitan jurnal kajian dan buku.

Pemikiran mempermudah akses itu disampaikan Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-47 Lemhannas RI, di auditorium Lemhannas, Jakarta, Rabu (23/5).

Menurut Gubernur Prof. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. hal mempermudah akses bagi publik dilakukan sebagai upaya peningkatan sumbangsih lembaga tersebut kepada masyarakat, bangsa dan negara..

"Pembuatan jurnal kajian dan buku tersebut ditujukan untuk mempermudah akses publik terhadap karya Lemhannas RI, yang berguna bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara" kata Prof. Budi Susilo Soepandji.

Penguatan peran Lemhannas RI menuju *world class institution* sebagai tema ulang tahun, menjadi stimulan peningkatan peran lembaga ini pada tingkat nasional, regional maupun global.

Peringatan hari ulang tahun juga diisi dengan orasi ilmiah tentang strategi pengentasan kemiskinan. Orasi itu disampaikan Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D, guru besar termuda Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Hadir pada ulang tahun itu, Jaksa Agung RI Basrief Arief, SH, MH, Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI J. Suryo Prabowo, dan Ketua Ikatan Alumni yang juga mantan Gubernur Lemhannas RI Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, M.Sc.



Foto : Humas Lemhannas



Orasi Pengentasan Kemiskinan Warnai HUT Lemhannas RI

Orasi ilmiah tentang strategi pengentasan kemiskinan mewarnai peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-47 Lemhannas RI, Rabu (23/5) di auditorium Lemhannas, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Orasi disampaikan Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D, guru besar Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Mengutip hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada 2011, Prof. Mudrajad antara lain mengatakan, kinerja pemerintah mendapat skor tertinggi dalam hal menyediakan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat.

Sementara pada sisi permasalahan ekonomi, lanjut guru besar termuda Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM itu, masih terdapat masalah harga-harga barang, jumlah orang miskin, dan pengangguran.

Dalam orasinya, Prof. Mudrajad mengemukakan berbagai hal tentang implementasi pengentasan yang berorientasi kepada penduduk miskin (pro-poor), pertumbuhan (pro-growth), dan pekerjaan (pro-jobs). Ia juga menjelaskan tentang peluang dan tantangannya.

Orasi diikuti seluruh peserta upacara HUT ke-47 Lemhannas. Di antaranya Jaksa Agung RI Basrief Arief, SH, MH, Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI J. Suryo Prabowo, dan Ketua Ikatan Alumni yang juga mantan Gubernur Lemhannas RI Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, M.Sc.

Penegakan Hukum di Laut Belum Maksimal

Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA mengatakan, pengamanan dan penegakan hukum di laut yang dilakukan dewasa ini belum maksimal.

Gubernur Prof. Budi Susilo Soepandji mengatakan hal tersebut pada acara *round table discussion* di Gedung Trigatra Lemhannas RI, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (29/5).

Menurut Prof. Budi Susilo Soepandji, belum maksimalnya pengamanan disebabkan berbagai hal, antara lain luasnya wilayah maritim Indonesia dan pelaksanaan pengamanan yang belum terbangun secara sinergi.

"Pelaksanaan pengamanan maritim yang belum terbangun secara sinergi terutama pelaksanaan dan koordinasi yang belum terintegrasi" paparnya seraya juga menyebut terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki satuan pengamanan.

Permasalahan keamanan wilayah maritim, begitu ujar Prof. Budi Susilo Soepandji, tidak hanya terkait dengan penegakan kedaulatan dan hukum. Menurutnya, laut juga harus aman dan bebas dari ancaman bagi pengguna atau dalam pemanfaatannya.

Dikatakan, terkait hal tersebut pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengamankan wilayah laut Indonesia.

Salah satunya adalah pembentukan Badan Koordinasi Keamanan laut (Bakorkamla) melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005. Badan ini dibentuk guna

menangani meningkatnya bentuk ancaman nirmiliter di laut.

Sebagai lembaga koordinasi, ke-13 anggota Bakorkamla memiliki tugas sebatas koordinasi.

Ia menyebutkan, banyak pihak yang melakukan kegiatan di wilayah maritim Indonesia dan melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan dan hukum yang merugikan Indonesia.

Kondisi tersebut, kata Prof. Budi Susilo Soepandji lagi, menyebabkan laut Indonesia memiliki tingkat kerawanan yang tinggi.

Roundtable discussion dengan tema "Penataan Pengamanan Wilayah Maritim guna Memelihara Stabilitas Keamanan dalam rangka Menjaga Kedaulatan NKRI" ini dihadiri Wakil Gubernur Letjen TNI Moeldoko, S.IP, Sekretaris Dewan Pengarah Pengarah Dr. Ardi Partadinata, MH, M.Si dan Sekretaris Utama Drs. Chandra Manan Mangan, M.Sc.

Hadir juga para deputy, tenaga ahli pengajar, pengkaji, dan tenaga profesional Lemhannas. Tampil sebagai narasumber pada diskusi itu, Wakil Asisten Operasi Kasal Laksma TNI Arie Hendricus Semiring dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Prof. Dr. Etty R. Agoes, S.H., LL.M.

Selain itu, tampil juga Kepala Pusat Infokum dan Kerja Sama Bakorkamla Laksma TNI Drs. Tri Yuswoyo, M.Sc, M.Eng, dan Wakil Dekan Fisip Universitas Indonesia Dr. Eddy Prasetyono.



Foto : Humas Lemhannas



Terjadi Pembiaran Terhadap Pancasila

Dewasa ini terjadi pembiaran terhadap Pancasila yang dipicu perubahan sistem, norma dan amandemen UUD Negara Republik Indonesia 1945. Demikian disampaikan Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA menyitir hasil kongres Pancasila ketiga yang dilaksanakan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, 31 Mei sampai 1 Juni 2011.

Hasil kongres yang menyebutkan terjadinya pembiaran terhadap Pancasila itu diungkap dalam acara *round table discussion* tentang pemahaman nilai-nilai kewaspadaan nasional di Gedung Astagatra Lemhannas RI, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (30/5).

Fakta tersebut diangkat dalam diskusi dalam konteks meningkatkan kewaspadaan nasional, yang melibatkan staf terkait dari Lemhannas RI dan dosen dari universitas negeri maupun swasta.

Menurut Gubernur Prof. Budi Susilo Soepandji, kewaspadaan nasional perlu didukung oleh usaha pemantauan sejak dini.

"Kewaspadaan nasional harus bertolak dari keyakinan ideologis dan nasionalisme yang kukuh serta perlu didukung oleh usaha pemantauan sejak dini dan terus menerus" kata Prof. Budi Susilo Soepandji.

Pemantauan sejak dini dan terus menerus itu, ujarnya, perlu dilakukan terhadap berbagai implikasi situasi dan kondisi yang berkembang, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pada kesempatan itu, Prof. Budi Susilo Soepandji juga menyampaikan pandangan Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono tentang perlunya reaktualisasi dan revitalisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pandangan Presiden itu disampaikan pada Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di Gedung MPR RI, Jakarta, Rabu (1/6) tahun lalu.

Lebih lanjut, Prof. Budi Susilo Soepandji mengatakan, kewaspadaan nasional merupakan subjek yang perlu diimplementasikan seluruh masyarakat dalam kehidupannya sebagai warga bangsa dan warga negara.

Round table discussion merupakan tindak lanjut dari rangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan Kedeputusan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan dengan lokus di 12 provinsi di Indonesia.



Kegiatan yang menjadi ajang curah pikir dan tukar pendapat ini menghadirkan

kan narasumber Tenaga Profesional Bidang Geopolitik dan Strategi Mayjen TNI (Purn) E. Imam Maksudi, SE dan Tenaga Profesional Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Dr. Kausar AS, M.Si.

Narasumber lainnya, Tenaga Profesional Bidang Ketahanan Nasional Mayjen TNI (Purn) Lumban Sianipar, S.IP, dan Tenaga Profesional Bidang Kewaspadaan Nasional Mayjen TNI (Purn) I Putu Sastra Wingarta, S.IP, M.Sc.

Turut hadir pada acara ini, Wakil Gubernur Letjen TNI Moeldoko, S.IP, Sekretaris Dewan Pengarah Dr. Ardi Partadinata, MH, M.Si, dan Sekretaris Utama Drs. Chandra Manan Mangan, M.Sc.

Hadir pula, Deputi Pengkajian Strategik Irjen (Pol) Herry Haryanto, para Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji Dan Tenaga Profesional, serta pejabat struktural Lemhannas RI.

Dari kalangan universitas, hadir Dosen Universitas Indonesia yang juga sebagai budayawan, Prof. Dr. Mudji Sutrisno, Ketua Lembaga Pengkajian Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB) Soeprapto, M.Ed., Dosen Universitas Negeri Jakarta Dr. Muhammad Maiwan, dan Dosen Universitas Esa Unggul Rizal Adhitya Hidayat, S.IP, M.M.



Ekonomi Kreatif

Dorong Pemanfaatan Cadangan Sumber Daya

Ekonomi kreatif mendorong pemanfaatan cadangan sumber daya yang terbarukan hingga sumber daya yang tidak terbatas seperti gagasan, bakat dan kreativitas, kata Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA.

Gubernur Prof. Budi Susilo Soepandji mengatakan itu pada acara round table discussion tentang pengembangan ekonomi kreatif guna menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan dalam rangka ketahanan nasional di Lemhannas RI, Jakarta.

Pada acara yang digelar di Gedung Trigatra, Kamis (31/5) itu, Prof. Budi Susilo Soepandji mengemukakan tentang nilai ekonomi dari suatu produk tidak lagi ditentukan bahan baku.

"Nilai ekonomi dari suatu produk tidak lagi ditentukan bahan baku atau sistem produksi, tetapi pada pemanfaatan kreativitas dan penciptaan inovasi melalui perkembangan teknologi yang semakin maju" ujarnya.

Kepada para peserta *round table discussion*, Prof. Budi Susilo Soepandji mengemukakan faktor harga dan kualitas produk yang tidak selalu dapat diandalkan dalam persaingan.

"Industri secara umum tidak dapat lagi bersaing di pasar global dengan hanya mengandalkan harga atau kualitas produk, tetapi harus bersaing berbasiskan inovasi, kreativitas dan imajinasi" katanya memberi argumen.

Ekonomi saat ini, begitu ujar Prof. Budi Susilo Supandji, sangat dipengaruhi globalisasi. Produk globalisasi itu antara lain berupa hak atas kekayaan intelektual (Haki), sebagai kapitalisasi dari intelektual manusia.

Siapa yang memiliki gagasan yang unik, lanjutnya lagi, dapat memproteksi idenya dan menghalangi orang lain untuk menggunakannya.

Pada kesempatan itu, Prof. Budi Susilo Supandji juga mengungkap perkembangan industri kreatif di Indonesia yang memberi kontribusi cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Industri kreatif, dikatakan juga dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Dengan merangsang industri kreatif di Indonesia, industri-industri lokal akan mengurangi ketergantungan industri manufaktur dalam pembayaran lisensi-lisensi terhadap produk asing.

Diharapkan, gelombang ekonomi kreatif mampu mengatasi persoalan ketenagakerjaan. Lebih dari itu, juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa.

Tampil sebagai narasumber pada acara ini, Direktur Jenderal Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Ukus Kuswara, Direktur Jenderal Bina Penta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Reyna Usman, Prof. Togar M. Simatupang, Ph.D, dan Aviliani, S.E., M.Si.

Pejabat Lemhannas yang hadir pada diskusi itu antara lain Wakil Gubernur Letjen TNI Moeldoko, S.IP, Sekretaris Dewan Pengarah Dr. Ardi Partadinata, MH, M.Si, dan Sekretaris Utama Drs. Chandra Manan Mangan, M.Sc.

Deputi Pengkajian Strategik Irjen (Pol) Herry Haryanto, para Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji dan Tenaga Profesional, serta pejabat struktural juga hadir pada acara tersebut.





Foto : Humas Lemhannas

Pembangunan Ekonomi Wilayah Perbatasan Perlu Penetapan Prioritas

Konsep pembangunan perekonomian wilayah perbatasan memerlukan penetapan prioritas yang tinggi dan dukungan peraturan perundang-undangan yang khusus, jelas dan tegas, kata Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA.

Gubernur Prof. Budi Susilo Soepandji mengatakan hal itu dalam seminar nasional bertajuk "Mengembangkan Pembangunan Ekonomi di Daerah Perbatasan NKRI" di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (31/5).

Hal mempercepat pembangunan sosial ekonomi di wilayah perbatasan, menurut Gubernur Prof. Budi Susilo Soepandji, harus dilaksanakan di segala bidang.

"Upaya mempercepat pembangunan sosial ekonomi di wilayah perbatasan harus dilaksanakan di segala bidang, mencakup pelayanan publik dan infrastruktur" katanya.

Mengenai prioritasnya, Prof. Budi Susilo Soepandji yang giat membangun komunikasi melalui media massa mengatakan, pembangunan dilakukan pada penyediaan kebutuhan infrastruktur dasar dan sarana-prasarana pertahanan keamanan.

Mengikuti hal itu, ia memandang pentingnya membentuk dan meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan yang mendorong terciptanya iklim kekeluargaan, kebersamaan dan semangat kebangsaan.

Hal membuka lapangan usaha baru, juga dipandang sebagai prioritas, baik bidang pertanian, perdagangan maupun nelayan. Membangun sentra ekonomi di wilayah perbatasan, demikian ia berujar, disesuaikan dengan karakteristik budaya, sumber daya dan ekonomi lokal.

Guna mengoptimalkan upaya tersebut, Prof. Budi Susilo Soepandji memandang perlu mengembangkan kerja sama dengan negara tetangga, dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketika menyampaikan makalah "Memperkuat

Perekonomian Daerah Perbatasan NKRI guna Memantapkan Ketahanan Nasional", Prof. Budi Susilo Soepandji memfokuskan perhatian pada daerah perbatasan darat yang secara langsung berhadapan dengan negara tetangga.

Pada seminar itu, Prof. Budi Susilo Soepandji mengingatkan pentingnya memahami ketahanan nasional secara utuh.

Ketahanan nasional, lanjutnya, merupakan kemampuan sistem kehidupan nasional untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Ketahanan nasional juga merupakan kemampuan mengembangkan kehidupan bangsa dalam menghadapi dinamika lingkungan strategisnya.

Integrasi kepentingan

Pembangunan wilayah perbatasan bukan program yang berdiri sendiri. Prof. Budi Susilo Soepandji menegaskan, pembangunan ini merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Oleh karena itulah dibutuhkan pengintegrasian berbagai kepentingan.

"Perlu mengintegrasikan kepentingan keamanan dan kesejahteraan penduduk, mengedepankan prinsip keseimbangan antara mental spiritual dan fisik material, antargolongan dan antarwilayah", katanya lebih menjelaskan.

Lebih jauh, pucuk pimpinan Lemhannas RI itu juga mengemukakan berbagai permasalahan lain seperti: belum tuntasnya perundingan penyelesaian batas antarnegara, minimnya infrastruktur dan tidak meratanya persebaran penduduk. Selain itu, juga masalah lambannya laju pembangunan, belum maksimalnya implementasi *grand design* pembangunan perbatasan, dan belum terjabarnya rencana tata ruang... (bersambung ke hal. 10)



(sambungan dari hal.9) kawasan strategis nasional ke dalam rencana tata ruang wilayah perbatasan.

Dari seminar terungkap timbulnya harapan agar perkuatan ekonomi wilayah berbasis pada rencana Kementerian Pekerjaan Umum RI untuk mengembangkan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di wilayah perbatasan dalam satu konsep pembangunan terpadu. Hal itu diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan.

Upaya memperkuat perekonomian daerah perbatasan juga dikatakan akan bermuara pada ketahanan daerah otonom, yang pada gilirannya akan memberi

sumbangan signifikan dalam pembinaan ketahanan nasional.

Seminar yang terselenggara atas kerja sama Telstra IKAL dengan Bank Indonesia ini menghadirkan Deputy Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas dan kontributor Ketua Umum IKAL, Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, M.Sc.

Hadir pula, Laksamana TNI (Purn) TH. Soesetyo dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri RI dan Dosen Universitas Indonesia Faisal Basri, SE, MA.

Gubernur Lemhannas RI: Paradigma Baru Korpri, Peningkatan Kompetensi

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA mengatakan, peningkatan kompetensi sebagai paradigma baru Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).

"Paradigma baru Korpri saat ini adalah meningkatkan kompetensi dalam mewujudkan sikap profesionalisme yang tinggi" katanya.

Gubernur Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji mengatakan hal itu pada pembukaan acara musyawarah Korpri di auditorium Lemhannas RI, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (6/6).

Pada kesempatan itu, Prof. Budi Susilo Soepandji juga mengemukakan pentingnya konsistensi dan profesionalisme dalam pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik.

"Konsistensi dan profesionalisme dalam pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, sekaligus sebagai perekat bangsa merupakan peluang sekaligus tantangan bagi seluruh anggota Korpri untuk maju" ujarnya lagi.

Memotivasi anggota Korpri Lemhannas RI, Prof. Budi Susilo Soepandji selaku Pembina Korpri Lemhannas RI mengatakan, perlunya pegawai negeri berjudul abdi negara tersebut meningkatkan kualitas serta kinerja, baik dari aspek organisasi maupun sumber daya manusia.

Peningkatan kualitas, begitu ujar pucuk pimpinan Lemhannas tersebut, berkaitan dengan tuntutan kinerja pemerintahan yang bersih, transparan, efektif dan akuntabel, sesuai dengan paradigma *good governance*.

Kepada peserta musyawarah, Prof. Budi Susilo Soepandji mengharapkan acara itu dapat menghasilkan program kerja yang mampu menjangkau,

menyejahterakan dan menjawab kebutuhan yang selama ini masih terabaikan.

Secara eksplisit, Prof. Budi Susilo Soepandji menyebut kebutuhan yang masih terabaikan seperti peningkatan sumber daya manusia dan kesejahteraan anggota Korpri.

Ia juga mengharapkan musyawarah dapat meningkatkan integritas, etika birokrasi yang tinggi, menyongsong Lemhannas RI sebagai institusi berkelas dunia (*world class institution*).

Musyawarah ini dihadiri Wakil Gubernur Letjen TNI Moeldoko, S.IP, Sekretaris Dewan Pengarah Dr. Ardi Partadinata, MH, M.Si, Sekretaris Utama Drs. Chandra Manan Mangan, M.Sc. Ketua III Dewan Pengurus Korpri Nasional Dr. Ir. Iskandar Andi Nuhung, M.S, Para Deputi, Pejabat Struktural dan Fungsional Lemhannas RI.

Musyawarah diwarnai dengan terpilihnya Drg. Sri Wahyuni Pudjiastuti sebagai Ketua Dewan Pengurus Kopri Lemhannas RI periode 2012 – 2017.



Foto : Humas Lemhannas





Foto : Humas Lemhannas

Lemhannas RI dan CDSS Australia Bahas Isu Keamanan Maritim

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) dan Pusat Studi Strategis Pertahanan (*Center for Defence and Strategic Studies/CDSS*) Australia membahas isu keamanan maritim di Gedung Trigatra Lemhannas, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (5/6).

Pembahasan mengenai keamanan maritim tersebut ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan peserta CDSS dalam isu-isu sosial, ekonomi, politik dan keamanan di kawasan yang sama.

Dalam pertemuan *Courtesy Call*, Gubernur Lemhannas Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA antara lain didampingi Wakil Gubernur Letjen TNI Moeldoko, S.I.P., Sekretaris Utama Drs. Chandra Manan Mangan, M.Sc. dan Tenaga Ahli Pengajar Bidang Hubungan Internasional Brigadir Jenderal TNI Avianto Saptono. Sementara itu rombongan CDSS Australia berjumlah 11 orang tersebut dipimpin Kolonel Colin Richardson.

Terkait isu keamanan maritim terungkap tentang pemahaman Indonesia yang didasarkan atas *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), sedangkan Singapura dan beberapa negara Asia lainnya didasarkan atas definisi *International Maritime Bureau* (IMB).

Seraya mengapresiasi kerja sama pada angkatan laut kedua negara, disampaikan, isu keamanan maritim bagi Indonesia tidak hanya terkait dengan angkatan laut. Keamanan maritim, juga menyangkut transportasi laut, penangkapan ikan (*fishing*) dan agribisnis kelautan.

Diskusi yang dimoderatori Tenaga Pengajar Bidang Hubungan Internasional Brigjen TNI Avianto Saptono itu, juga membahas masalah penyelundupan manusia dan tukar-menukar informasi intelijen (*intelligence sharing*).

Mengenai kerja sama bidang maritim, bulan lalu Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan China, termasuk *intelligence sharing*.

Diskusi tersebut juga dihadiri Tenaga Pengkaji Bidang Geografi Mayor Jenderal TNI Endang Chaeruddin, Tenaga Profesional Bidang Diplomasi Laksda TNI (Purn.) Robert Mangindaan, Karo Humas Brigjen TNI Sahat Aritonang, Karo Kerja Sama Brigjen TNI Danu Nawawi, enam orang perwakilan dari PPRA 47, termasuk di dalamnya seorang peserta asing dari Singapura.

Sementara itu dari pihak CDSS, terdapat peserta dari Selandia Baru, China, Jepang, Pakistan dan Filipina. Diharapkan, melalui kemitraan kedua lembaga, dapat meningkatkan hubungan baik dan kerja sama Indonesia dan Australia.



LEMHANNAS RI

newsletter

edisi 35, 20 Juni 2012

11



Foto : Humas Lemhannas

Lemhannas RI dan Harian Sinar Harapan Jalin Kerja Sama

Lemhannas RI dan surat kabar harian Sinar Harapan menjalin kerja sama dalam bidang peningkatan kemampuan menulis dengan gaya populer dan komunikatif.

Perlunya kerja sama tersebut dibicarakan ketika Gubernur Lemhannas Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA menerima General Manager Business Development Sinar Harapan, Rusdanie dalam acara audiensi di ruang tamu pimpinan Lemhannas RI, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Pada pertemuan Kamis (31/5) itu Gubernur menjelaskan hal sejarah, profil dan kegiatan yang dilaksanakan di Lemhannas RI, yang menggambarkan peran lembaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Merespons Gubernur, *General Manager Business Development* Sinar Harapan menyatakan, sebagai suatu lembaga negara, Lemhannas memiliki peran besar dan strategis dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan peran tersebut, lanjutnya, pemikiran Lemhannas sudah semestinya disampaikan kepada publik melalui penulisan buku dengan gaya populer dan komunikatif.

Dalam audiensi itu, pihak Sinar Harapan menyatakan perlunya rubrik Bingkai NKRI pada Sinar Harapan *Online* NKRI yang akan dikembangkan oleh Sinar Harapan. Dalam kesempatan ini, Gubernur Lemhannas RI mengundang jurnalis Sinar Harapan untuk mengikuti pendidikan/kursus di Lemhannas RI.

Menurut rencana, Lemhannas RI akan menyelenggarakan pendidikan bagi kalangan media massa.

Diharapkan, kerja sama yang akan terjalin dapat menjadi model untuk kerja sama dengan media massa lainnya. Tindak lanjut kerja sama ini akan dilaksanakan Biro Kerja Setama Lemhannas RI untuk dapat dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman (*memorandum of understanding/MoU*).

